BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui "Pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024)". Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial, dinyatakan bahwa *Intergovernmental Revenue* memiliki nilai *t*-hitung sebesar -2,677 > *t*-tabel 1,990 dan nilai Sig. = 0,009 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa *Intergpvernmental Revenue* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah, dimana peningkatan ketergantungan terhadap dana transfer pusat cenderung menurunkan tingkat kemandirian kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
2. Secara parsial, dinyatakan bahwa Belanja Daerah memiliki nilai *t*-hitung sebesar 0,718 < *t*-tabel 1,990 dan nilai Sig. = 0,475 > 0,05. Maka dapat simpulkan bahwa Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa alokasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum mampu secara langsung meningkatkan efektivitas atau efisiensi kinerja keuangan secara keseluruhan. Dengan kata lain, alokasi belanja daerah belum dilakukan secara optimal dan efisien untuk mendongkrak rasio kemandirian keuangan.
3. Secara parsial, dinyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah memiliki nilai *t*-hitung sebesar -2,576 > *t*-tabel 1,990 dan nilai Sig. = 0,012 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah.

Artinya, setiap peningkatan pada ukuran pemerintah daerah maka akan diikuti oleh penurunan rasio kinerja keuangan daerah.

4. Secara simultan, ditemukan bahwa *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini didasarkan pada nilai F-hitung sebesar 2,875 > F-tabel 2,72 dan nilai Sig. 0,041 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan berpengaruh signifikan secara simultan.

Berdasarkan data tersebut pada akhir periode pengamatan 2024. Urutan tingkat kemandirian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Rasio Kemandirian
1	Kota Medan	1,13969155
2	Kab. Labuhanbatu Selatan	1,08026136
3	Kab. Deli Serdang	0,57777146
4	Kota Sibolga	0,27909999
5	Kota Tebing Tinggi	0,20694993
6	Kota Binjai	0,19223070
7	Kota Pematang Siantar	0,16761338
8	Kota Padang Sidempuan	0,16468092
9	Kab. Batubara	0,15438249
10	Kab. Labuhanbatu	0,14104943
11	Kab. Tapanuli Utara	0,13923049
12	Kab. Tapanuli Selatan	0,13252339
13	Kab. Asahan	0,12204849
14	Kab. Samosir	0,11638615
15	Kab. Serdang Bedagai	0,10880907
16	Kota Tanjung Balai	0,10639179
17	Kab. Humbang Hasundutan	0,10379924

18	Kab. Nias	0,10282754
19	Kab. Karo	0,09790350
20	Kab. Mandailing Natal	0,09382856
21	Kab. Langkat	0,09248588
22	Kab. Dairi	0,09051520
23	Kab. Toba	0,08388854
24	Kab. Simalungun	0,07963603
25	Kota Gunung Sitoli	0,06675395
26	Kab. Labuhanbatu Utara	0,05890048
27	Kab. Tapanuli Tengah	0,05741187
28	Kab. Padang Lawas	0,05726100
29	Kab. Padang Lawas Utara	0,05493501
30	Kab. Nias Utara	0,05257383
31	Kab. Pakpak Barat	0,05100066
32	Kab. Nias Barat	0,02414208
33	Kab. Nias Selatan	0,01504374

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

   Pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap *Intergovernmental Revenue* (dana transfer) yang terbukti berpengaruh signifikan namun memberikan tekanan pada kinerja keuangan. Selain itu, mengingat variabel Belanja Daerah tidak menunjukkan berpengaruh dalam penelitian ini, pemerintah daerah disarankan untuk melakukan restrukturisasi alokasi belanja dengan mengalihkan fokus dari belanja operasional yang bersifat konsumtif ke arah belanja modal yang lebih produktif, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan aset (Ukuran Pemerintah Daerah) agar besarnya skala organisasi tidak menjadi beban yang justru menurunkan kualitas kinerja keuangan daerah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan mengintegrasikan variabel-variabel baru yang lebih kompleks, seperti Opini Audit, Tingkat *Leverage*, atau variabel non-keuangan seperti transparansi dan implementasi *e-government*, mengingat nilai koefisien determinasi *(R-Square*) dalam model ini masih relatif kecil. Selain itu, penggunaan periode pengamatan yang lebih panjang (*longitudinal*) serta penerapan variabel moderasi atau mediasi sangat disarankan untuk menggali lebih dalam alasan di balik tidak berpengaruhnya variabel belanja terhadap kinerja keuangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan memiliki tingkat generalisasi hasil yang lebih tinggi bagi tata kelola keuangan publik di Indonesia.